

# STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Azrul Bahari

NPP. 29.0010

*Asdaf Kota Banda Aceh Provinsi Aceh  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: azrulbahari04@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background:** The author focuses on the problem that there are still a number of factors that influence the smooth operation of BUMG so that BUMG's management has not added value to the economic growth of the community. **Purpose:** The purpose of this research is to identify and analyze the Regional Government Strategy in the Development of Gampong Owned Enterprises (BUMG) in Banda Aceh City and to find out the inhibiting factors and the efforts made to overcome them. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of Walker's theory of strategy. Data collection techniques using in-depth interviews (13 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The main internal inhibiting factor in the process of developing BUMG is that the number of human resources is still quite a lot which is not sufficient so that it hampers the process of managing BUMG. Where there are many difficulties for BUMG which have been given to business mda, but cannot survive in the long term because they are not optimal in managing the budget and business units. **Conclusion:** That the Regional GOVERNMENT STRATEGY in developing BUMG in Banda Aceh City Aceh Province has been quite good but there are several evaluations that need to be done so that other BUMGs that are still in the pioneering classification can be included in the classification of developing and even advanced in order to achieve one of the Banda Aceh City Government Missions in improve the quality of the community's economy can be achieved optimally.

**Keywords:** Strategy, Local Government, Development, BUMG

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan masih terdapatnya sejumlah faktor yang ikut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan operasional BUMG sehingga Pengelolaan BUMG belum memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori

strategi dari Walker. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (13 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Faktor penghambat internal utama dalam proses pengembangan BUMG ialah jumlah SDM masih cukup banyak yang belum memadai sehingga menghambat proses pengelolaan BUMG. Dimana banyak susah BUMG yang telah di berikannya mda usaha akan tetapi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu panjang dikarenakan tidak maksimalnya dalam mengelola anggaran serta unit usahanya. **Kesimpulan:** Bahwa STRATEGI PEMERINTAHAN Daerah dalam pengembangan BUMG di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah cukup baik namun ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan agar BUMG lainnya yang masih berada di klasifikasi merintis dapat masuk kedalam klasifikasi berkembang bahkan maju agar pencapaian salah satu Misi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

**Kata Kunci:** Strategi, Pemerintah Daerah, Pengembangan, BUMG

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki beragam suku dan budaya serta potensi-potensi di setiap daerahnya yang dapat dikembangkan sebagai identitas dan kualitas negara. Dalam hal ini juga mencakup pencapaian cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu wujud untuk mencapai cita-cita negara dengan meningkatkan pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada dari segi ekonomi, sumber daya alam, maupun infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, yang mana hasil dari pengelolaan sumberdayatersebut seluruhnya ditujukan seluas-luasnya terhadap kepentingan masyarakat. Pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya terkait dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanaikebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Provinsi Aceh merupakan daerah yang wilayahnya berada di ujung Barat Pulau Sumatera. Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberi status sebagai daerah istimewa. Ibu kota Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh, luas wilayahnya mencapai 58.377 km<sup>2</sup> serta jumlah populasinya 5,372 jiwa. Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah yang paling berat terkena dampak dari dahsyatnya ombak tsunami. Oleh karena itu hampir seluruh sudut wilayah di Kota Banda Aceh hancur leburbaik yang di pusat kota maupun yang ada di desa-desa. Dampak yang dirasakan masyarakat Kota Banda Aceh saat itu cukup signifikan seperti, banyaknya korban jiwa, hilangnya harta benda dan sumber penghasilan serta berbagai macam kerugian materiil lainnya. Menurut R.H Unang Soenardjo yang dikutip oleh Umar Nain, S.Sos.,M.Si, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan yang sangat kuat lahir dan batin baik karena kepentingan berupa politik, sosial, ekonomi

maupun keamanan. Desa juga memiliki susunan kepengurusan yang dipilih secara bersama, memiliki kekayaan alam atau lainnya dalam jumlah tertentu serta berhak mengelola dan menjalankan rumah tangga sendiri.<sup>3</sup> Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kestabilan ekonomi di tingkat desa ialah dengan membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Khusus wilayah Provinsi Aceh istilah desa disebut sebagai gampong. Istilah tersebut diangkat dari unsur budaya dan juga sejarah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang intinya Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang didelegasikan menjadi hak otonom. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan badan usaha yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas ekonomi serta pengembangan potensi wilayah yang dimiliki setiap desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong ini dibentuk sesuai dengan peraturan yang ada pada setiap gampong tersebut, yang mana proses kepengurusan ini terdiri dari Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong setempat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya tertuang, pembentukan Badan Usaha Milik Gampong ini merupakan salah satu STRATEGI PEMERINTAHAN untuk “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuai dengan komitmen pemerintah yang tercantum di dalam NAWACITA. Peranan masyarakat secara aktif sangat berpengaruh terhadap terealisasinya program-program serta STRATEGI PEMERINTAHAN, dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaksanaannya. Dalam hal ini hasil yang akan diperoleh dari pengembangan serta pengelolaan BUMG ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat gampong itu sendiri. Penelitian yang peneliti ambil merujuk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh untuk proses pengambilan data serta sebagai pusat observasi secara langsung. Dapat dilihat dari total jumlah desa yang ada di Kota Banda Aceh tidak sebanding dengan jumlah Badan Usaha Milik Gampong yang ada.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh yaitu belum meratanya pembentukan Badan Usaha Milik Gampong di wilayah Kota Banda Aceh, selain itu ditemukannya masih terdapat sejumlah faktor yang ikut memengaruhi kelancaran pelaksanaan operasional BUMG. Keberadaan BUMG juga belum bersinergi dalam pengembangan potensi desa dan belum mendukung keberlangsungan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu pengelolaan BUMG belum memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan belum adanya Badan Usaha Milik Gampong yang masuk kedalam klasifikasi Maju.

Peranan masyarakat secara aktif sangat berpengaruh terhadap terealisasinya program-program serta STRATEGI PEMERINTAHAN, dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaksanaannya. Dalam hal ini hasil yang akan diperoleh dari pengembangan serta pengelolaan BUMG ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat gampong itu sendiri. Proses pengembangan setiap program-program juga tidak kalah penting demi keberlangsungan BUMG dalam jangka waktu yang panjang serta menghadirkan inovasi-inovasi baru dengan mengikuti perkembangan dunia di era Globalisasi. Seharusnya dengan adanya dukungan dana dan juga perkembangan teknologi yang cukup pesat dapat membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong ini menjadi jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Senyatanya hal ini tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari

masyarakat akan pentingnya pengembangan serta pengelolaan potensi wilayah dengan baik dan tepat sasaran.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh. Penelitian Aryo Sosiawan berjudul *Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul*, menemukan bahwasannya program BUMDesa dalam memberdayakan masyarakat desa telah terlaksana secara optimal melalui 4 bina yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Tri Iyatul Fitriani yang berjudul *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Dana Desa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya pengembangan BUMDes melalui dana desa di Kecamatan Genteng belum berjalan optimal dikarenakan tidak semua desa di Kecamatan Genteng memberikan penyertaan modal dari dana desa kepada BUMDes serta kapasitas pengurus BUMDes masih rendah.

Penelitian berikutnya yaitu dari Ahmad Sukron Jazila yang berjudul *Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka Akselerator Pertumbuhan Ekonomi di Desa Sukorejo Gandusari* yang berkesimpulan bahwasannya kondisi internal yaitu pada faktor kekuatan telah terlaksana dengan baik..

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dibuat penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Kota Banda Aceh. Berbeda dari Aryo Sosiawan, Tri Iyatul Fitriani, Ahmad Sukron Jazila. Selain itu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan badan usaha yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas ekonomi serta pengembangan potensi wilayah yang dimiliki setiap desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong ini dibentuk sesuai dengan peraturan yang ada pada setiap gampong tersebut, yang mana proses kepengurusan ini terdiri dari Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong setempat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya tertuang, pembentukan Badan Usaha Milik Gampong ini merupakan salah satu STRATEGI PEMERINTAHAN untuk “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuai dengan komitmen pemerintah yang tercantum di dalam Nawacita.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Startegi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Wali Kota Banda Aceh, Ketua DPR Kota Banda Aceh, Sekda Kota Banda Aceh, Asisten Daerah 2, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, Kepala Seksi Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong, Direktur Badan Usaha Milik Gampong, Penyelenggara Badan Usaha Milik Gampong dan masyarakat (sebanayak 3 orang).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Startegi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh menggunakan teori dari Walker. Teori tersebut memiliki 5 indikator dalam mengukur strategi pemerintahan yaitu Lingkup, Tujuan dan Sasaran, Alokasi Sumber Daya, Sumber Keunggulan Kompetitif, Sumber Sinergi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

### **3.1. Lingkup**

Lingkup memiliki peran penting dalam menentukan langkah awal dalam penelitian ini untuk menentukan kebijakan apa saja yang akan diterapkan serta menghimpun industri atau segmen mana saja yang akan dipilih sebagai subjek penelitian. Pada lini proses penelitian terkait “Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh” peneliti mengambillingkup yang dimasukkan kedalam sampel penelitian ialah BUMG yang sudah masuk kedalam klasifikasi berkembang. Kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Banda Acehterkait Strategi Pemerintahan dalam pengembangan BUMG inidi regulasi melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pada Peraturan Walikota ini membahas terkait definisi secara keseluruhan tentang Gampong dan juga definisi Keuchik. Oleh karena itu terkait mekanisme penyaluran Dana Desa maupun penggunaan Dana Desa serta teknis perhitungan dana Desa tersebut diperjelas dalam Peraturan Walikota ini termasuk dalam Penyaluran Dana untuk Pembentukan BUMG. Pemerintah sudah sangat mendukung dan mendorong terkait pengembangan BUMG yang ada di Kota Banda Aceh dengan memberi dukungan melalui pendistribusian anggaran serta hal ini di atur di dalam Perwal No.3 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Menurut perkembangan yang ada dilapangan produk yang dihasilkan oleh kedua BUMG ini merupakan produk yang notabeneanya dibutuhkan terus-menerus oleh masyarakat serta dapat terus dikembangkan sesuai dengan permintaan yang konsumen inginkan. Selain itu kedua BUMG ini sudah memiliki langganan tetap sehingga kepercayaan konsumen terhadap hasil produk dari kedua BUMG ini sudah dapat dipercaya dan berkualitas.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan komponen penting dalam terealisasinya suatu strategi, dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas dapat mengarahkan suatu strategi sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan serta meminimalisir tingkat kegagalan juga faktor penghambat lainnya. Suatu tujuan dan sasaran juga penting untuk mengarahkan kemana arah kerja suatu organisasi serta menargetkan sasaran yang ingin dicapai agar dapat menyusun strategi secara tepat dan efektif. Dalam penelitian ini peneliti langsung menganalisis berdasarkan informasi dan data yang peneliti dapatkan dilapangan terhadap strategi yang diambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengembangkan setiap BUMG. tujuan dan sasaran utama dari Pemerintah Kota Banda Aceh terkait pengembangan BUMG ialah untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh, dimulai dari wilayah gampong. Selain itu juga sasaran utama yang dikembangkan yaitu sumber daya yang ada di tiap gampong, serta membantu memfasilitasi unit-unit usaha masyarakat agar terorganisir secara maksimal. Adapun saran yang dapat peneliti berikan berupa masyarakat harus lebih antusias dalam proses peningkatan edukasi terkait mekanisme pengelolaan unit usaha agar proses pencapaian target dapat tercapai secara maksimal.

### **3.3 Alokasi Sumber Daya**

Alokasi sumber daya ini bertujuan menganalisis sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap organisasi agar dapat teralokasi sesuai harapan dan kebutuhan organisasinya, oleh karena itu alokasi dalam penelitian ini difokuskan kepada proses alokasi sumber daya dana serta alokasi sarana dan prasarana. Terkait pendistribusian anggaran atau penyertaan modal usaha dapat dilihat dari anggaran yang diterima oleh tiap-tiap yang ada di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu terkait pengalokasian anggaran untuk pengelolaan BUMG juga telah diatur dan distribusikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh khusus oleh DPMG Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan dilihat bahwa pernyataan dari pemerintah dan juga tanggapan dari pengelola unit usaha BUMG telah sesuai. Anggaran yang dialokasikan juga sudah sesuai, hanya saja masih ada beberapa BUMG yang belum mendapatkan penyaluran dana dikarenakan belum rampungnya mekanisme kerja unit usaha serta pengaturan sistem unit kerja yang belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **3.4 Sumber Keunggulan Kompetitif**

Sumber keunggulan kompetitif ini sangat menentukan terkait jalannya BUMG dalam pengelolaannya agar tetap dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan. Dalam hal ini juga dapat dianalisis faktor apa saja yang dapat mendukung dari jalannya unit usaha yang terhimpun didalam BUMG. Proses pengelolaan BUMG sangat bergantung dari perencanaan strategi yang matang dengan menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan di awal perencanaan strategi agar organisasi dapat memperoleh target secara maksimal. Dampak yang diterima masyarakat dari pengelolaan BUMG ini sangatlah berpengaruh dan membantu. Hal ini merupakan salah satu pencapaian bagi Pemerintah Kota Banda Aceh terkhusus bagi pemerintah gampong terkait yang sudah berupaya maksimal dalam memberikan pembinaan serta dorongan atas jalannya setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMG. Selain itu menentukan usaha prioritas juga sangatlah penting agar dapat memberikan nilai jual lebih pada saat menghadapi persaingan dipasar. Adapun saran yang dapat peneliti berikan berupa, kedua BUMG ini harus memiliki inovasi baru dalam proses produksi maupun proses pemasarannya.

### 3.5 Sumber Sinergi

Sumber sinergi dalam penelitian ini mencakup bagaimana pemerintah dapat memberikan pengembangan ditingkat gampong seperti mawadahi masyarakat dalam pengembangan SDM, edukasi terkait pengelolaan anggaran serta pengembangan aset yang dimiliki desa lainnya. Pelaksanaan pendidikan dilungkup gampong sangatlah penting guna meningkatkan serta memberikan pengetahuan secara dasar kepada masyarakat agar dapat terus diberdayakan dikundianhari dari segi bidang apapun. Selain itu pengikatan SDM juga dapat dilihat dari adanya pengasahan tingkat keahlian yang dimiliki masyarakat. Pemerintah telah memberikan berbagi pembinaan serta pelatihan bagi masyarakat yang mana sepeuhnyamasyarakat yang tela memiliki bekal ilmu tersebut dapat diberdayakan di masing-masing BUMG yang ada di gampongnya. Pemanfaatan PAG ini juga penting untuk diperhatikan karena dengan adanya PAG dapat menambah modal usaha bagi pengelolaan BUMG , selain itu PAG juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi gampong lainnya seperti pengelolaan SDA yang dimiliki oleh tiap-tiap gampong terkhusus dapat membantu unit-unit usaha yang terhimpun dalam BUMG. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan dalam mengelolaa usaha serta pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap gampong. Selanjutnya 2 BUMG yang telah masuk kedalam klasifikasi berkembang ini akan di jadikan sebagai *Role Model* untuk mengembangkan BUMG lainnya yang masih dalam proses merintis agar dapat mencapai target pengembangan secara keseluruhan.

### 3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Strategi pemerintahan daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dimana pemerintah sudah sangat mendukung dan mendorong terkait pengembangan BUMG yang ada di Kota Banda Aceh dengan memberi dukungan melalui pendistribusian anggaran serta hal ini diatur di dalam Perwal No.3 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Hanya 2 BUMG yang masuk kedalam klasifikasi berkembang sedangkan BUMG yang ada di kota Banda Aceh berjumlah 90. Oleh krena itu masi cukup banyak BUMG yang harus terus dikembangkan agar dapat masuk kedalam klasifikasi berkembang. Produk yang dihasilkan oleh kedua BUMG ini merupakan produk yang notabeneanya dibutuhkan terus-menerus oleh masyarakat serta dapat terus dikembangkan sesuai dengan permintaan yang konsumen inginkan. Selain itu kedua BUMG ini sudah memiliki langganan tetap sehingga kepercayaan konsemen terhadap hasil produk dari kedua BUMG ini sudah dapat dipercaya dan berkualitas.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Aryo Sosiawan (Aryo Sosiawan, 2019), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu jumlah SDM masih cukup banyak yang belum mamadai sehingga menghambat proses pengelolaan BUMG. Dimana banyak susah BUMG yang telah di berikannya mda usaha akan tetapi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu panjang dikarenakan tidak maksimalnya dalam mengelola anggaran serta unit usahanya.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari temuan Tri Ivatul Fitriani (Tri Ivatul Fitriani, 2019) dimana pemerintah juga memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan dalam mengelolaa usaha serta pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap gampong, selanjutnya 2 BUMG yang telah masuk kedalam klasifikasi berkembang ini akan di jadikan sebagai *Role Model*

untuk mengembangkan BUMG lainnya yang masih dalam proses merintis agar dapat mencapai target pengembangan secara keseluruhan.

Strategi pemerintahan daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Banda Aceh juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu DPMG memberikan pernyataan bahwa yang menjadi faktor penghambat eksternal utama terdapat pada SDM yang dimiliki gampong masih belum maksimal dalam menyerap informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak efektif dalam proses pembinaan SDM nya. Sedangkan pengelola BUMG menyatakan faktor penghambat eksternal utama terdapat pada anggaran yang didistribusikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sering terlambat sehingga mempengaruhi proses pengelolaan BUMG tersebut seperti temuan Ahmad Sukron (Ahmad Sukron, 2014).

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hambatan dalam pelaksanaan strategi pemerintahan daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu faktor penghambat internal utama dalam proses pengembangan BUMG ialah jumlah SDM masih cukup banyak yang belum memadai sehingga menghambat proses pengelolaan BUMG. Dimana banyak usaha BUMG yang telah di berikannya mda usaha akan tetapi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu panjang dikarenakan tidak maksimalnya dalam mengelola anggaran serta unit usahanya. Selain itu Faktor penghambat eksternal dalam proses pengembangan BUMG terdapat dua pandangan yang berbeda antar Pemerintah khususnya DPMG dengan pengelola BUMG. DPMG memberikan pernyataan bahwa yang menjadi faktor penghambat eksternal utama terdapat pada SDM yang dimiliki gampong masih belum maksimal dalam menyerap informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak efektif dalam proses pembinaan SDM nya. Sedangkan pengelola BUMG menyatakan faktor penghambat eksternal utama terdapat pada anggaran yang didistribusikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sering terlambat sehingga mempengaruhi proses pengelolaan BUMG tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mengambil langkah untuk melaksanakan upaya langsung berupa observasi lapangan dengan cara memantau perkembangan tiap BUMG serta melihat kekurangan dan kendala di lapangan secara lebih detail agar pengambilan keputusan dan kebijakan dapat tepat sasaran. Disamping itu berbeda dengan upaya langsung yang dilakukan oleh pengelola BUMG, mereka langsung mencari solusi di lapangan contohnya seperti pada saat kekurangannya anggaran yang mana pengelola BUMG langsung mengambil tindakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga membuat kesepakatan simpan pinjam terkait modal usaha dengan beberapa kesepakatan yang mereka sepakati. Selanjutnya pengelola BUMG lebih sering melibatkan masyarakat yang sudah berkecimpung di dalam BUMG agar dapat terus belajar serta menambah pengalaman dengan harapan ilmu yang didapat dapat diturunkan kepada penerus BUMG lainnya.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Bahwa STRATEGI PEMERINTAHAN Daerah dalam pengembangan BUMG di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah cukup baik namun ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan agar BUMG lainnya yang masih berada di klasifikasi merintis dapat masuk kedalam klasifikasi berkembang bahkan maju agar pencapain salah satu Misi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Walker.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pemerintahan daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto,dkk.(1997). *Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 10
- Nain, Umar. (2017).*Realisasi Pemerintah Desa Dan Superdesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kamaroesid. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Muhammad, Suwarsono. (2012). *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: PenerbitErlangga
- Sosiowan, Aryo. (2019).*Program Badan Usaha Milik Desa Dalam MemberdayakanMasyarakat Desa Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul*.Makassar : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- IvatuI fitriani, Tri. (2019). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)Melalui Dana Desa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur* .Jatinagor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sukron, Ahmad. (2020), *Analisis Strategi Pengembangan Badan UsahaMilik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Akseerator Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sukorejo Gandusari Trenggalek* : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Prof. Dr. J. Salusu, M. A. (1996). *Pengambilan Keputusan strategik UntukOrganisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta :PT GrasindoEt al.Heene., Manajemen Strategik Keorgansiasian Publik.
- Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*.
- Suradinata.Ermaya, *Manajemen Perubahan Dan Strategi* : KepemimpinanKreatif.
- Tjiptono. Fandy. (2015). *Strategi Pemasaran Edisi Empat*.Yogyakarta:Andi.
- Mathis.I, H.Robert. jackson, *Human Resource Management*.
- Rangkuti, Freddy. (2014). *Analisis SWOT Teknik Membedah KasusBisnis*. Jakarta: PT Gramedia